



Honor PNS Yogya Dipangkas

UMBULHARJO (MERAPI) - Anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja tahun 2018 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Yogyakarta dipangkas. Pengurangan TPP dengan sistem honor itu untuk menyesuaikan defisit anggaran yang harus diturunkan maksimal 4 persen sesuai evaluasi gubernur terhadap APBD 2018 Kota Yogya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, awalnya anggaran TPP tahun 2018 direncanakan Rp 219 miliar. Tapi besaran anggaran TPP tersebut lalu diturunkan menjadi Rp 171 miliar dalam APBD 2018.

"Sudah diturunkan anggaran tunjangan perbaikan penghasilan. Tujuan pengurangan karena hasil evaluasi gubernur mengharapkan defisit anggaran 2018 menjadi empat persen," kata Kadri, Minggu (7/1).

Dia menjelaskan, saat APBD 2018 diajukan ke gubernur untuk dievaluasi, defisit anggaran mencapai 7 persen atau sekitar Rp 123 miliar. Kemudian dievaluasi agar besaran defisit diturunkan menjadi 4 persen atau sekitar Rp 68 miliar, sehingga beberapa anggaran dikurangi. Salah satu pos anggaran yang dipangkas adalah TPP. "Pengurangan terbesar untuk mencapai defisit empat persen dilakukan di pos anggaran

tunjangan perbaikan penghasilan," ujarnya.

Mulai tahun 2018, pemberian TPP menggunakan mekanisme baru berdasarkan kinerja PNS dari sebelumnya dengan sistem honor.

Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono mengatakan, pemberian TPP diukur berdasarkan absensi kehadiran, capaian kinerja fisik dan anggaran, pengukuran kinerja dari penilaian rekan kerja dan peringkat atau *grade* tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme pemberian TPP berbasis kinerja itu mengacu Permenpan Reformasi Birokrasi No 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Pegawai.

"Dengan berbasis kinerja bisa terukur sehingga besaran tunjangan benar-benar sesuai pekerjaan yang sudah dilakukan. Selain itu ada pemerataan hak TPP. Ini tentu akan meningkatkan semangat pegawai untuk bekerja maksimal," papar Kris.

Sebelumnya dengan sistem honorarium setiap pegawai yang masuk dalam tim kegiatan akan mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan. Menurutnya dengan TPP berbasis kinerja, pegawai dengan jabatan tinggi dimungkinkan tidak akan menerima tunjangan sebesar tahun lalu dan sebagian pegawai akan naik tunjangannya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005